TEMBALANG – Perbaikan pada proses penyusunan kebijakan publik mendesak dilakukan, untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan dan efisiensi anggaran negara. Keberadaan analisis kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan sehingga peraturan yang muncul tidak hanya didasari oleh opini.

"Analisi kebijakan memiliki peran strategis untuk mendorong perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK memiliki peran untuk menganalisis persoalan kebijakan, menjembatani hasil kajian dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan keputusan oleh *decision maker,*" papar Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, disela seminar nasional 'Advokasi Pengembangan JFAK'di di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip Tembalang, Jumat (24/3).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Undip, Universitas Indonesia (UI) dan

Universitas Gajah Mada (UGM). "Prioritas kerja sama in, tidak hanya di bidang analisis jabatan tetapi juga pengembangan kualitas kebijakan, peningkatan proses perumusan kebijakan dan keberanian untuk melaksanakannya," tandasnya.

Harapan juga disampaikan Rektor Undip Prof Yos Johan Utama. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun hubungan yang baik antara masing-masing institusi. "Kita berharap kerjasama ini mampu meningkatkan peran Undip, dalma tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat," terangnya.

Sementara, Dekan FISIP Undip Dr Sunarto MSi berharap, kerja sama tersebut juga memberikan manfaat bagi keilmuan Administrasi Publik. "Kita ingin lulusan dari Administrasi Publik Undip akan semakin kompeten. Perjanjian ini sekaligus juga diharapkan akan memiliki nilai jual di pasar, serta melindungi kepentingan-kepentingan keilmuan" tuturnya. ■ Rix-rth